

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan pemerintah daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 diganti menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (PEMDA) dikarenakan memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Menurut Syauckani (2002) otonomi daerah dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang diharapkan dari pemerintah daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah adalah fasilitas, pemerintah harus kreatif, politik lokal yang stabil, jaminan kesinambungan berusaha, komunikatif, yang utama bagi pembangunan daerah adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi, maka daya beli akan meningkat dan pada akhirnya akan mempengaruhi pajak. Jika daya beli meningkat, pajak yang dihasilkan meningkat akan meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Menurut Halim (2007) Setelah diperlakukannya otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan mencerminkan otonomi daerah.

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Dalam Wijaya (2001) PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Mardiasmo (2002) menyatakan masih banyak peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dikaji secara hati-hati. Salah satu peraturan itu adalah peraturan tentang keuangan daerah, yang mengatur tentang APBD yang merupakan salah satu instrumen utama bagi pemerintah untuk meningkatkan efisien dan efektifitasnya dalam mendorong proses pembangunan daerah.

Menurut Widodo (2004) menyatakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan berupa PAD untuk membiayai daerahnya. Untuk meningkatkan PAD pemerintah perlu mendukung usaha rakyat. Dari usaha rakyat tersebut akan menghasilkan pajak dan retribusi, dari pajak dan retribusi yang dihasilkan akan meningkatkan PAD. Untuk mengembangkan usaha rakyat dibutuhkan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang diberikan yaitu tidak mempersulit dalam pengurusan pendirian usaha. Daerah yang mendukung

usaha rakyat seperti kabupaten sragen yang mendirikan pelayanan satu atap untuk mempermudah masyarakat mendirikan usaha mereka.

Ardi (2008) menyatakan anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Dalam penelitian ini kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian bertujuan untuk mengetahui apakah daerah akan semakin mandiri, rasio kemandirian menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Menurut Halim (2007) Perencanaan pembangunan daerah diawali dengan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Perencanaan anggaran daerah tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan peningkatan pelayanan publik tanpa diimbangi dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik, tidak mungkin tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Langkah yang harus digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan adalah mengoptimalkan PAD dengan cara menghitung potensi PAD secara sistematis.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam David dan Priyo (2007) Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita. Dalam Lilis (2002) PDRB merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai PDRB yang tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian daerah tersebut semakin membaik.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan yang mantap selama beberapa tahun ini tidak berarti bahwa pekerjaan telah selesai. Perekonomian belum sepenuhnya pulih, kegiatan disejumlah sektor khususnya sektor riil masih dibawah kapasitas. Pertumbuhan ekonomi juga belum cukup untuk menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Ini dikarenakan perekonomian masih rentang terhadap kejutan (shok), baik karena faktor politik, sosial, kondisi negara lain serta berbagai hal lainnya. Tujuan akhir pertumbuhan ekonomi adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui

pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta berbagai permasalahan lain yang melanda negara ini.

Kemerosotan yang terjadi pada sektor riil mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, baik di perkotaan maupun dipedesaan. Pemerintah dituntut untuk mengambil inisiatif kebijakan fiskal untuk menumbuhkan perekonomian dalam rangka mengentas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan stabil akan mendorong berkurangnya angka kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran.

Kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan secara ekonomis, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparaturnya dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut (Hamzah, 2008).

Sebagai provinsi dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang cukup besar, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dalam hal rentang kendali dan penyebaran pembangunan. Kesenjangan pembangunan akibat pemusatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan menimbulkan persoalan-persoalan kesejahteraan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. paska krisis tahun 1997 menunjukkan kecendrungan meningkat. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel, restoran dan sektor pertanian. Namun demikian, Pertumbuhan Ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Penulis juga memasukan faktor lag yaitu perbedaan periode antara variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen mencakup Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah yaitu periode 2001-2006 dan Pertumbuhan Ekonomi yaitu periode 2002-2007, Pengangguran dan Kemiskinan yaitu periode 2003-2008.

Gambaran seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, agar perencanaan pembangunan daerah dapat ditentukan prioritasnya, khususnya dalam era otonomi daerah saat ini dimana pemerintah kabupaten/kota diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan agar tercapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Peran Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan “(Studi Empiris Kab/Kota, di Tiga Propinsi Pulau Jawa)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kemandirian yang digunakan adalah PAD dibagi dengan Total Pendapatan.
2. Efisiensi yang digunakan adalah Realisasi Pengeluaran dibagi dengan Realisasi Penerimaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan rumusan masalah adalah:

1. Apakah kemandirian keuangan daerah secara langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah efisiensi keuangan daerah secara langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berhubungan dengan pengangguran?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berhubungan dengan kemiskinan?
5. Apakah kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi?
6. Apakah efisiensi keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi?
7. Apakah kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi?

8. Apakah efisiensi keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi?

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Peran Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan di daerah Propinsi Jawa tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang meliputi:

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah kemandirian keuangan daerah secara langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menemukan bukti empiris apakah efisiensi keuangan daerah secara langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk menemukan bukti empiris apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berhubungan dengan pengangguran.
4. Untuk menemukan bukti empiris apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berhubungan dengan kemiskinan.
5. Untuk menemukan bukti empiris apakah kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
6. Untuk menemukan bukti empiris apakah efisiensi keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

7. Untuk menemukan bukti empiris apakah kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
8. Untuk menemukan bukti empiris apakah efisiensi keuangan daerah secara tidak langsung berhubungan dengan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.